



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN FLORES TIMUR
Jln. Ile Napo : Telp / Fax [0383] 2551234**

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan yang Mahakuasa karena atas penyertaan dan penyelenggaraan ilahi-Nya, kami dapat menyelesaikan dan menyajikan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Dokumen Perencanaan Pembangunan tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam pembuatan dan penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. Sehingga diharapkan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja dapat berpedoman dan sesuai dengan tema RKPD tahun 2025 yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Peningkatan Produktifitas.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini belum sempurna adanya. Untuk itu, kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaannya di tahun anggaran selanjutnya. Kami pun menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang dengan caranya telah membantu kami dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 ini.

Larantuka, Agustus 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Ramon Mandiri Piran
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670501 199303 1 014

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	20
	3.3. Program dan Kegiatan	22
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V	PENUTUP	25

Daftar Tabel lampiran

Tabel	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Pernagkat Daerah s/d Tahun lalu Dinas Tenaga Kerja Kab. Flores Timur	
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kab. Flores Timur	
Tabel T2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja kab. Flores Timur	
Tabel .2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kab. Flores Timur	
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kab. Flores Timur	



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat rencana Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2025.

- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V penutup.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPERIDA.
- (3) Kepala BAPPERIDA melakukan evaluasi RKPD Tahun 2025 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 6 Agustus 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 6 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 11

BAB I

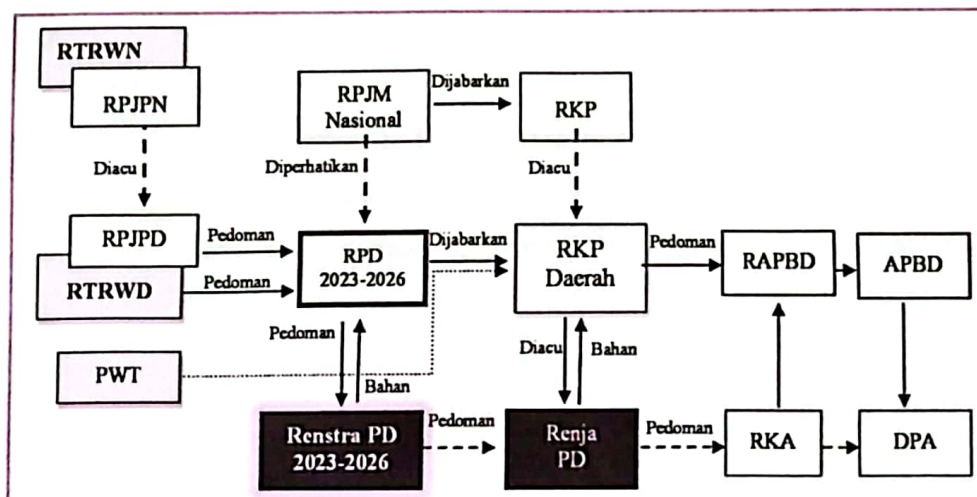
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, *stakeholder* lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja Dinas Tenaga Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Dinas Tenaga Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Organisasi Perangkat Daerah).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturdan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur;
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor : 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor : 9 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah :

- a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
- b. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Tenaga Kerja
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2025
- d. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Meliputi: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU meliputi: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra , Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH meliputi: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan sebuah organisasi yang akuntabel perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitasnya dengan melakukan klarifikasi atas *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Uraian tentang hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu dapat dilihat pada rincian table 2.1 di bawah ini :

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat *pada lampiran Tabel 2. 1* Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renja Perangkat Daerah.

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Renstra Gerangkat Daerah Pada Tahun 2023- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran/Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah/Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	B=7/6		(9)	10=(5+7+9)
							K				K		K	
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang									
2-7	3-32	0-0	01		DINAS TENAGA KERJA									
2	07	01			Program Penunjang Urusan									
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)								
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)								
						Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)								
						Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)								
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	16		4	4	1	4	4	25.00
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)			2	2	100	2	2	#VALUE!
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	8		2	2	100	2	2	25.00
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	20		6	6	100	5	5	25.00
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8		4	4	100	2	2	25.00
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	12		3	3	100	3	3	25.00
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	60		20	17	85	20	20	33.33

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Rencana Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	$8=7/6$	(9)	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	4		0	0	#DIV/0!	1	1	25,00
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	4		1	1	100	1	1	25,00
2	07	01	2.02	04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (Dokumen)	4		0	0	#DIV/0!	-	-	-
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	8		2	2	100	2	2	25,00
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	100		12	12	100	12	12	12,00
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6		6	6	100	6	6	100,00
2	07	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dok)	3		0	0	#DIV/0!	0	-	-
2	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan milik daerah pada SKPD (Laporan)	18		0	0	#DIV/0!	6	6	33,33
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)			0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2	07	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4		1	1	100	1	1	25,00

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2024 (Abit Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kebijakan/Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Ini (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun n-2)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Rencana Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	16		4	4	100	4	4	25,00
2	07	01	2.05	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2		0	0	#DIV/0!	0	-	-
2	07	01	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang melakukan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2		0	0	#DIV/0!	0	-	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100		100	100	100	100	100	100,00
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	12		3	3	100	2	2	16,67
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	10		4	4	100	2	2	20,00
2	07	01	2.06	03	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga (paket)	4		1	1	100	1	1	25,00
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)	5		2	2	100	1	1	20,00
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengundangan	Jumlah paket barang cetak dan pengundangan (paket)	8		2	2	100	2	2	25,00
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		1	1	100	1	1	25,00

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2024 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Rencana Perangkat DaerahTahun n-2	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=7/6	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	48		12	12	100	12	12	25,00
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48		12	12	100	12	12	25,00
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan (Unit)			35	0	-	26	26	#DIV/0!
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	45		15	0	-	20	20	44,44
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	5		4	0	-	1	1	20,00
2	07	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1		1	0	-		-	-
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	11		3	0	-	4	4	36,36
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	12		11	0	-	1	1	8,33
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100	75	75	1	1	#DIV/0!
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48		12	12	100	12	12	25,00

URUSAN	BIDANG/URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Rencana Daerah/Provinsi Tahun 2023-2024 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Staf Program dan Keluaran/Kegiatan s/d Tahun n-1	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Sisa (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Rencana Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(11/12)*100	(15)=(13/14)*100
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48		12	12	100	12	12	25,00
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan/ Laporan)	4		1	0	-	1	1	25,00
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48		12	12	100	12	12	25,00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100	71.4	71	100,000	100	#DIV/0!
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		3	3	100	5	5	166,67
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	58		15	0	-	0	-	-
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2		2	2	100	2	2	100,00
2	07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)	1		1	0	-	2	2	200,00
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2		2	2	100	1	1	50,00
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	33		11	11	100	5	5	15,15

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET RENCANA DERRANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023-2024 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi TARGET Kinerja Hasil Program dan Kelembagaan Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun n-1)	Pembinaan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN n-2	Realisasi RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	5		1	1	100	1	1	20,00
											#DIV/0!		-	#DIV/0!
2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						#DIV/0!		-	#DIV/0!
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2.93%		2.86	3.47	121	2.88	3	#VALUE!
						Persentase pemenuhan sarana pelatihan B.L.K (%)			0		#DIV/0!		-	#DIV/0!
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	95		30	30	100	46	46	48,42
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	95		30	30	100	25	25	26,32
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun (Lembaga)	20		4	4	100	5	5	25,00
2	07	03	2.02	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja (unit)	120		0	0	#DIV/0!	0	-	-
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)			5	0	-	5	5	#DIV/0!

URUTAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET RENCANA Dokumen Perencanaan Dokumen Tahun 2023- 2024 (Akar Perencanaan Perencanaan Dokumen)	Realisasi Target Kinerja Real Program dan Kegiatan/Kegiatan 1/4 Tahun 1/2	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 1/4 (1/4-2)			TARGET PROGRAM dan Kegiatan Dokumen Perencanaan Dokumen Tahun 1/4	Perencanaan Realisasi Capaian Target Rencana Perencanaan Dokumen 1/4 Tahun 1/2		
									TARGET RENCANA Dokumen Tahun 1/4	Realisasi RENCANA Dokumen Tahun 1/4	TARGET Realisasi (%)		Realisasi Rencana Dokumen Tahun 1/4 Tahun 1/2	TARGET Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang aktif (Lembaga)	15		5	0		-	0	-	
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	49%		47.2	45.5		95	47.7	43	
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)	100		100	0		-	100	100.00	
2	07	04	2.01	01	penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimbel dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	1		0	0	#D/N/DI	0	-	-	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)	400		100	0		-	100	100	25.00
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan (orang)	400		100	0		-	0	-	-
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	115		30	0		-	0	-	-
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja dalam 1 tahun di kabupaten			1	1		100	2	2	#D/N/DI
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	11		5	5		100	2	2	18.18
2	07	04	2.03		Pengelola Informasi Pasar Kerja							#D/N/DI	-	#D/N/DI	
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online (Dokumen)	4		1	1		100	1	1	25.00

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=7/6	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota	Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kab/Kota			250	212	85	100	100	#DIV/0!
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya (orang)	800		250	212	85	0	-	-
02	07	04	2.04	02	Penyediaan layanan Terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang melayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani (Orang)	2100		525	0	-	200	200	9.52
02	07	04	2.04	03	Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan (Orang)	80		20	0	-	15	15	18.75
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)			80	100	125	80	80	#DIV/0!
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam dsatu daerah Kab/Kota	Tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kab/kota			10	-	-		-	#DIV/0!
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online (Perusahaan)	30		10	10	100	10	10	33.33
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerjasama(Perusahaan)	30		10	0	-	0	-	-

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Renstra Oerangkat Daerah Pada Tahun 2023-2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial (PP-PKB) struktur skala upah dan LKS bipartit dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (laporan)	30		10	10	100	0	-	-
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota	Jumlah perselisihan yang dapat dicegah dan diselesaikan			15	22	147		-	#DIV/0!
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah (Perkara)	65		20	0	-	20	20	30.77
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial mogok kerja, dsan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara Perselisihan yang terselesaikan(Perkara)	60		10	22	220	25	25	41.67

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET RENCANA GEMUKUT DAERAH PADA TAHUN 2023-2024 (Akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah)	Realisasi TARGET KEMUKUT RENCANA GEMUKUT DAERAH a-3	TARGET DAN REALISASI KEMUKUT RENCANA GEMUKUT DAERAH TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENCANA GEMUKUT DAERAH a/4 TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENCANA GEMUKUT DAERAH TAHUN n-2	Realisasi RENCANA GEMUKUT DAERAH TAHUN n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program kegiatan a/4 Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh/serikat non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (asosiasi dan Serikat Pekerja)	6		6	0	-	7	7	116,67
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja (Orang)	60		100	62	62	50	50	83,33
											#DIV/0!		-	#DIV/0!
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi						#DIV/0!		-	#DIV/0!
3	32	02			Program Pervencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)	2		2	-	-	1	1	50,00
3	32	02	2.01		Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (kawasan)			4		-	-	-	#DIV/0!
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	8		2	0	-	2	2	25,00
3	32	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah penetapan kawasan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	4		4	0	-	0	-	-
3	32	02	2.01	03	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi (Hektar)	604		2 UPT (604 Hektar)	0	#VALUE!	0	-	-
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi pada UPT yang dibangun (%)	2		2		-	-	-	-
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk	Tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk			2		-	-	-	#DIV/0!

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran/Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Rencana Perangkat Daerah/Tahun n-2	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan jumlah pemukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) (Dokumen)	1		1	1	100	0	-	-
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan (Kepala Keluarga)	750		250	250	100	0	-	-
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)			4	4	100	50	50	#DIV/0!
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Pemukiman pada tahap kemandirian	Tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian (Satuan Pemukiman)			4	4	100	2	2	#DIV/0!
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dilatih (Kepala Keluarga)	200		300	325	108	50	50	25,00
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan (satuan pemukiman)	4		2	0	-	2	2	50,00

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah pada Tahun 2023 terlihat bahwa

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Program /kegiatan pada Tahun 2023 yang tidak memenuhi target pada Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), Sub Kegiatan : Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI (CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya Orang), Yaitu target 250 orang tetapi terlayani 212 orang 15 jenazah, 62 orang PMI deportasi, 45 AKAD, 15 AKAN dan 71 pencaker). Tidak memenuhi target akan tetapi secara kualitas jenazah yng dipulangkan dan dideportasi serta kepengurusan untuk AKAD dan AKAN tetap dilayani seluruhnya hanya jumlah pencajer yang berkurang, dsini termasuk pengurusan kartu kuning bagi pencari kerja, dapat disimpulkan bahwa masih ada perusahaan atau penerima jasa tenaga kerja yang tidak mengharuskan calon tenaga kerja yang direkrut untuk melampirkan kartu kuning.
 - Program Hubungan Industrial ,Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Pada Sub kegiatan ini target 100 orang akan tetapi tercapai 62 orang saja penambahan tahun 2023 ini, sehingga dibutuhkan beberapa strategi kedepannya untuk memenuhi target ini.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Pada program Penunjang Urusan pemerintahan, dapat terealisasi dengan baik
 - Pada program urusan ketenagakerjaan, Pada program pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja serta Program Penempatan Tenaga Kerja dapat diserap dan terealisasi dengan baik, dimana sesuai dengan target yaitu jumlah

- Tenaga Kerja yang dilatih tata busana pakaian kantor sebanyak 30 orang dan target juga 30 orang, sehingga mencapai 100%.
 - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi ,Kegiatan Penataan persebaran penduduk dimana Sub Kegiatannya Penyiapan Lingkungan hunian fisik,sosial,ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi serta sub kegiatan Penyuluhan Transmigrasi juga memnuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2023.
 - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi,Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian, Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman dan Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman. Sub Kegiatan tersebut juga memnuhi target tahun 2023.(tabel evaluasi Tahun 2023 Terlampir)
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Pada Program Hubungan Industrial, kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ,mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah/Kota, Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,mogok kerja dan penutupan Perusahaan dimana capaian kinerja melebihi target. Targetnya 10 kasus , akan tetapi mendekati akhir Tahun 2023 jumlah penyelesaian masalah bertambah menjadi 22 dan semuanya di selesaikan sesuai standar.
- d. Faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada Program Penempatan Tenaga Kerja target belum tercapai karena :
- Target dihitung berdasarkan jumlah pencari kerja dengan acuan pengurusan kartu kuning, sehingga pengurusan kartu kuning kurang maka mengurangi capaian. Hal ini salah satu disebabkan masih ada beberapa lowongan pekerjaan yang ditawarkan tapi tidak membutuhkan kartu kuning.
 - Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti jalur AKAD dan AKAN maupun mandiri jumlahnya tidak sebanyak tahun lalu.kemungkinan karena adanya jalur mencari pekerjaan yang tidak melalui pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Ilegal).

- Jumlah CPMI/PMI yang dideportasi dan dipulangkan tidak sebanyak jumlah pada Tahun 2022 sehingga target tidak tercapai berdasarkan perhitungan 3 tahun terakhir ini.
 - Ada Kegiatan pada Program Penempatan tenaga Kerja yaitu salah satunya Penyerapan Tenaga Kerja melalui padat karya tidak diakomodir pada Tahun 2023 (tidak mendapat alokasi anggaran tahun 2023 dari pemerintah daerah terkait adanya kebijakan)
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah tidak dapatnya terlaksana beberapa program yang mendukung visi misi daerah. Apabila dibandingkan kegiatan program/kegiatan dengan target Renstra Pada Tahun 2023 maka ada program yang terdapat pada renstra OPD Tahun 2023 tidak diakomodir pada APBD Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja yaitu Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi. Selain itu juga terdapat beberapa Kegiatan yang tidak diakomodir pada tahun 2023 dan merupakan salah satu pendukung untuk tercapainya jumlah CPMI/PMI yang diberdayakan melalui sistem padat karya.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan tentang tidak terakomodirnya kegiatan penempatan tenaga kerja melalui padat karya sudah didiskusikan secara efektivitas dan efisiensi anggaran daerah yang mendukung kegiatan tersebut. Akan tetapi ada kebijakan daerah yang belum dapat diakomodirnya kegiatan tersebut. Untuk kasus pada Hubungan Industrial penyelesaian kasus beberapa kasus dapat diselesaikan/dimediasi sebagai fasilitator pada pihak pemberi dan penerima pekerjaan di Kantor Dinas Tenaga kerja, walaupun tidak efektif tapi bisa diselesaikan dengan baik sesuai target penyelesaian kasus.

Kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kebijakan dari peraturan daerah melihat tingkat urgensinya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Uraian ini dapat dilihat *pada lampiran tabel .2.2*

Pada analisa kinerja pelayanan perangkat daerah (n-2) dapat dilihat pada bab ini, dimana Pada Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2023-2026 terlihat bahwa ada perbedaan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023. Ada banyak penyebab perbedaan ini diantaranya adanya kebijakan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan adanya keterbatasan alokasi pagu anggaran yang diberikan pada Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pada Renstra dan Renja Tahun 2023

No	Uraian	Renstra	RKPD Sebelum Perubahan	RKPD Setelah Perubahan
1	Urusan Ketenagakerjaan			
	a. program	4	4	4
	b. Kegiatan	16	16	13
	c.Sub Kegiatan	52	37	35
2	Urusan Ketransmigrasian			
	a. Program	3	3	2
	b.Kegiatan	3	3	2
	c. Sub kegiatan	7	7	3
3	Total Pagu	2.985.405.960	3.791.561.800	2.580.307.227

Pada perubahan renja 2023 ini mengalami penurunan pagu diantaranya adanya pemberlakuan PMK 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan

Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 yang mengakibatkan adanya perubahan pada rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 target dan realisasi dapat dilihat pada tabel lampiran dibawah ini dari triwulan I s/d Triwulan IV tahun 2023 dengan pencapaian 91,82% dari total pagu Rp. 2.580.307.227 dan realisasi Rp. 2.369.282.273. Sementara capaian kinerja Dinas Tenaga kerja Tahun 2023 sebesar 85,3 % dan termasuk kategori baik.

Gambaran Kinerja Pelayanan perangkat daerah dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci perangkat daerah dapat disajikan pada tabel di bawah ini : (lampiran sbb)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Keterangan
1	persentase Tingkat Pengangguran	3,56	3,42	artinya dari 100 pnddk usia produktif yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (AK) sebanyak 3 orng merupakan pengangguran

Pada tabel diatas Terlihat penurunan dari target tapi tidak besar pengaruhnya sehingga membutuhkan upaya dari semua pihak untuk berkoordinasi menurunkan angka ini. Tingkat pengangguran yang dilaporkan oleh Dinas tenaga kerja berdasarkan data dari BPS yang disandingkan dengan pelayanan yang merupakan tupoksi dari Dinas Tenaga Kerja, perhitungannya yaitu pengangguran terbuka (data BPS kab. Flotim) dikurangkan dengan pelayanan kinerja Dinas Tenaga Kerja termasuk data AKAD, data AKAN, data Tenaga Kerja dengan prosedur mandiri, data yang ikut pelatihan berbasis kompetensi dibandingkan dengan jumlah data angkatan kerja (data BPS Kab. Flotim).

Sementara data pendukung untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat juga pada tabel dibawah ini terlihat bahwa beberapa indikator pelayanan yang dilakukan sebagian besar mencapai target yang diharapkan di Tahun 2023 ini.

No	Indikator Kinerja Program (Output/outcome)	target Tahun 2023	capaian tahun 2023	Keterangan
1	Persentase LPK yang memiliki Perizinan	100	100	dari 5 LPK semua memiliki izin dan masih berlaku
2	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	100	ada 30 peserta pelatihan dan 30 yang bersertifikat
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	47,4	45,8	CPMI /PMI yang terlayani dan ditempatkan dibandingkan dengan 131 yang mengurus Kartu Kuning, AKAD= 45 orang dan AKAN=15 orang
4	Jumlah CPMI/CTKI yang diberikan pelatihan	100	56	diberikan pelatihan dan atau pembekalan sebelum ditempatkan
5	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar di Kab/Kota	150	131	yang mengurus kartu Kuning di Disnaker. Kepengurusan ini tergantung dari pemberi upah/kerja memberikan persyaratan kartu kuning atau tidak terhadap penerima upah.
6	Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan fasilitas kepulangan	50	41,33	berdasarkan Jmlh PMI yang difasilitasi kepulangannya dibagi jumlah PMI yang pulang
7	Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani	100	100	ada 22 kasus yang terdata dan semuanya diselesaikan/dibantu upaya penyelesaian
8	Persentase Perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (%)	35	49	ada 49 % perusahaan terdata tahun 2023 yang memiliki PP (Perusahaan yang memiliki TK 10 orang atau lebih
9	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB),LKS Bipart,Struktur skala upah,	35	0	tahun 2023 belum ada perusahaan yang menyusun secara lengkap termasuk PKB dan struktur skala upah. Di

No	Indikator Kinerja Program (Output/outcome)	target Tahun 2023	capaian tahun 2023	Keterangan
	terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan			Kabupaten Flores Timur belum ada jenis perusahaan besar yang menetapkan tata kelola kerja layak. Jenis perusahaan yang menetapkan tata kelola layak terdapat dikota /provinsi.
10	Persentase Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	35	35	dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang sudah terdaftar peserta BPJS dibandingkan dengan jumlah perusahaan wajib lapor
11	Persentase jumlah Perusahaan yang berselisih yang ditangani	100	100	ada 22 perusahaan/ pemberi kerja yang berselisih dan semuanya ditangani
12	Persentase perelisihan HI yang diselesaikan melalui PB oleh mediator	100	95	ada 21 yang diselesaikan dengan PB dari 22 kasus terdaftar
13	Jumlah Satuan Pemukiman yang dibina	6 UPT	4 UPT	tahun 2023 belum ada pembangunan kawasan baru sehingga hanya 4 UPT yang dibina(UPT Libu di desa Tuawolo Kec. Adotim; UPT purinara desa Narasaosina kec. Adotim; UPT watanpao desa Bloto Kec. Adotim; UPT tanameang desa Adabang Kec. Titehena

Untuk capaian evaluasi renja sampai dengan triwulan 4 terlihat pada tabel lampiran dibawah ini sbb :, dimana terlihat capaian renja sampai dengan triwulan 4 untuk kinerja sebesar 85,3 tergolong kategori Baik dan penyerapan realisasi keuangan sebesar 91,8 %.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun rincian indikator kinerja yang ditentukan dalam NSPK dan SPM, review terhadap IKK, maka ada beberapa indikator yang

dituju dan diwujudkan dengan target dan target masing-masing perusahaan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kinerja pelayanan. Hal ini bertujuan pada saat analisis pencapaian kinerja pelayanan daerah yang dibandingkan dengan target rencana strategis perusahaan daerah Tahun 2013-2018 dan terdapat sebagai berikut pada tabel 2.2 berikut ini:

2.2

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

No	Indikator	SPM/Sta ndar	IKK	target Renstra perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		catatan analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
	Urusan Ketenagakerjaan											
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja Per tahun		V	10	15	15	20	22	8	15	20	angka sengketa pertahun meningkat setiap tahunnya karena semakin terbukanya lapangan pekerjaan yang membutuhkan suatu upaya pencapaian dan penyelesaian setiap kasus dalam pemberi dan penerima pekerjaan
2	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		V	13	13	15	15	21	8	15	15	Meningkatnya jumlah angka sengketa antara pengusaha dan penerima kerja maka dengan penyelesaian oleh mediator penyelesaian dengan upaya perjanjian bersama juga meningkat
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		V	100	100	100	100	60	29	100	100	selama masa renstra tingkat pengangguran juga tinggi sehingga dibutuhkan upaya peningkatan penempatan tenaga kerja secara prosedural sesuai dengan program nasional
4	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek		V	1500	1600	1900	1900	1308	1841	1900	1900	meningkatnya jumlah penerima kerja sebaiknya diikuti dengan kepesertaan jamsostek sehingga memberikan perlindungan dan keamanan bagi penerima kerja
5	Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		V	0	0	0	0	0	0	0	0	masa renstra dan kebijakan tentang pekerja dan pemberi kerja dari pemda selalu mengacu dari pusat sehingga hal ini tidak terjadi
6	Besaran tenaga yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi		V	25	46	40	45	30	45	40	45	kegiatan ini dari tahun sebelumnya tidak terlaksana tapi pada tahun lalu sudah mulai dilaksanakan dengan dukungan dana tetapi dukungan dana belum maksimal mencapai target yang ditetapkan sehingga masih dibawah standar realisasi targetnya
7	Besaran tenaga yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat			0	0	0	0	0	0	0	0	0 Pelatihan ini tidak ada dalam masa renstra ini
8	Besaran tenaga yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan			0	0	0	0	0	0	0	0	0 Pelatihan ini tidak ada dalam masa renstra ini
	Urusan ketransmigrasian											
1	Persentase Transmigran swakarsa			0.48	0	0	0	0				

Pada Tahun 2023 terlihat bahwa target renstra disusun berdasarkan keadaan beberapa tahun sebelumnya dengan memprediksi Tahun berikutnya, akan tetapi kenyataan tahun berjalan ada beberapa kebijakan dari aturan daerah yang tidak mendukung tercapainya beberapa indikator dalam ketentuan tersebut, juga adanya masa transisi dari covid 19 yang melanda ke keadaan yang normal sehingga membutuhkan beberapa perhatian karena dampaknya pada perlindungan dan dukungan pada tenaga kerja di Kabupaten Flores Timur ini.

Seperti terlihat pada angka sengketa pengusaha (pemberi kerja) dengan penerima kerja/penerima upah capaian Tahun 2023 cukup tinggi sebesar 22 kasus dari target renstra 10 kasus saja. Kasus ini termasuk PHK dan perselisihan yang dengan Perjanjian Bersama. Untuk capaian kinerja pada indikator Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan juga belum mencapai target dari 100 pencari kerja yang ditempatkan ada 60 orang (AKAD dan AKAN), termasuk disini tidak adanya dukungan dana /anggaran untuk kegiatan padat karya yang juga menyerap sebagian dari pencari kerja Tahun 2023.

Capaian Kinerja pada Tahun 2024 masih dalam perhitungan semester I (januari- juni) sehingga realisasi masih rendah bila dibandingkan target setahunnya.

Indikator Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten Flores Timur tidak terdapat datanya, dimana kebijakan tentang pekerja dan pemberi kerja dari pemerintah daerah selalu mengacu dari kebijakan pemerintah pusat sehingga tidak ada (demonstrasi buruh terhadap kebijakan perusahaan tertentu). Khusus untuk persentase transmigran swakarsa tidak terdapat di Kabupaten Flores Timur, dan tidak ada dalam usulan Renstra perangkat daerah.

2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Renstra Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT maka ditentukan isu

strategis yang dirumuskan menjadi beberapa factor penghambat dan factor pendukung. Faktor penghambat diantaranya

1. Rendahnya Daya saing SDM ketenagakerjaan.
2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana UPT Latihan Kerja , serta minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan SDM Pengelola pelatihan.
3. Belum maksimalnya pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi lokal. Termasuk diantaranya RTSP pengembangan kawasan Transmigrasi menjadi lebih layak huni dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi(belum adanya dukungan anggaran untuk pengembangan wilayah Transmigrasi khususnya RTSP)
4. Ketersediaan Sarana Prasarana yang lengkap dan sesuai standar yang dapat mendukung kinerja (Gedung kantor,peralatan dan perlengkapan kantor)
5. Kawasan Translok yang penguasaannya masih ditanah ulayat dan terbatasnya pengalokasian anggaran untuk urusan transmigrasi.
6. Penyebaran luasan info bursa Kerja Online belum secara maksimal baik itu dalam segi penggunaannya dan SDM penggunaan Bursa Kerja Online(Tenaga belum terlatih)
7. Penyerapan BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal /belum menyebar pada pekerja mandiri disebabkan kurangnya penyebarluasan informasi dari segi manfaat dan kurangnya sosialisasi pada pekerja mandiri bukan penerima upah.

Beberapa factor pendukung diantaranya :

1. Kerjasama lintas sector terkait masalah ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta urusan ketransmigrasian.
2. Adanya MOU dengan perusahaan dan stakeholder lainnya terkait kerjasama dibidang pelatihan dan penempatan.
3. Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI, PMI
5. Adanya perusahaan yang legal yang bias memfasilitasi tenaga kerja
6. Adanya peraturan tentang urusan ketransmigrasian .

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja 2025 apabila didukung oleh SDM dan SDA yang berkualitas maka diharapkan mampu untuk menekan jumlah tingkat pengangguran setiap tahunnya sehingga salah satu tujuan dari pembangunan di kabupaten Flores Timur dapat dicapai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Renja

Rumusan Pada bagian ini menjelaskan bahwa pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada *lampiran tabel 2.3 dibawah ini* :

Berdasarkan tabel terlihat hasil analisis kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan Rancangan awal RKPD salah satu diantaranya karena adanya penambahan target dan volume yang akan dicapai seperti dalam hal pelatihan produktivitas tenaga kerja berdasarkan kompetensi, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Untuk kegiatan perluasan kesempatan kerja juga mengalami penambahan volume dari yang diusulkan awal dengan berbagai pertimbangan bahwa penyerapan tenaga kerja dengan melihat target yang ingin dicapai. Penempatan tenaga kerja termasuk perlindungan CPMI /PMI termasuk penjemputan jenazah, PMI yang dideportasi dan pengurusan AKAD dan AKAN sangat diperlukan mengingat selama ini alokasi anggaran belum mencukupi, karena dibutuhkan sosialisasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait upaya perlindungan CPMI/PMI .

Pada Urusan Transmigrasi khususnya pengembangan kawasan transmigrasi pada sub kegiatan penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial dan ekonomi membutuhkan dana yang besar untuk membentuk RTSP(REncana Teknis Satuan permukiman) sehingga kawasan Transmigrasi yang ada dapat dibuatkan dokumen RTSP yang menjadi salah satu syarat kawasan transmigrasi layak huni.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan				
					Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Estimasi Biaya	Saluran Pembiayaan
2		3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS TENAGA KERJA				3.302.896.000,00				4.000.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BAWA YANG TEGAS BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.800.796.000,00				3.000.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.800.796.000,00				3.000.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	2.800.446.000,00				3.000.000.000,00	
		Tingkat pelayanan administrasi pemerintahan	100			Tingkat pelayanan administrasi pemerintahan			
		persentase keterlaksanaan sarana dan prasarana operator (%)	80%			persentase keterlaksanaan sarana dan prasarana operator (%)			
		persentase ASN yang memiliki kompetensi (%)	90%			persentase ASN yang memiliki kompetensi (%)			
		persentase perencanaan dan pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%			persentase perencanaan dan pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan (%)			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	4 Dokumen	95.000.000,00		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)		100.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	20.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan (dok)	2 Dokumen	1.501.146.050,00		Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan (dok)	2 Dokumen	1.800.000.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.433.146.050,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.800.000.000,00	untuk ASN/PSK sebanyak 20 orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	58.000.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	1 Dokumen	11.000.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	1 Dokumen	19.000.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	11.000.000,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	3 orang	39.000.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	3 orang	23000000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	8.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100%	181.300.000,00				197.000.000,00	
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor									
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.300.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu									
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	94.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	23 unit	100.000.000,00		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	23 unit	113.000.000,00	
Pengadaan Mebel									
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	58.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	65.000.000,00	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2		3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100%	101.000.000,00		persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)		87.200.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.000.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.200.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100%	125.000.000,00		persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)		113.500.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70.000.000,00	
Pemeliharaan Mebel									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	9.500.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Selentingan (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,91%	542.000.000,00		persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)		622.000.000,00	
		Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standar (unit)	50 unit			Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standar (unit)			
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	20 orang	832.000.000,00		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		612.000.000,00	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Master Kompetensi									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ie Mandiri, Lelwa Lema, Demong Pagong, Wilihama, Adonara Timur, Ie Bura, Solor Barat, Titehena, Wotan Ulumado	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Orang	410.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ie Mandiri, Lelwa Lema, Demong Pagong, Wilihama, Adonara Timur, Ie Bura, Solor Barat, Titehena, Wotan Ulumado	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40	490.000.000,00	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja									
	Kab. Flores Timur, Larantuka, Adonara Barat, Wulanggitang, Ie Mandiri	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Adonara Barat, Wulanggitang, Ie Mandiri	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	12.000.000,00	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									
	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50 Unit	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50 Unit	150.000.000,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 lembaga	10.000.000,00		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		10.000.000,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka-Lokea, Walihai, Walibatu, Kecamatan Wulanggitang Hokeng Jaya, Kecamatan Adonara Barat-Walwardan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka-Lokea, Walihai, Walibatu, Kecamatan Wulanggitang Hokeng Jaya, Kecamatan Adonara Barat-Walwardan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	10.000.000,00	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2		3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		persentase penyerapan tenaga kerja (%)	48,2%	83.500.000,00		persentase penyerapan tenaga kerja (%)		250.000.000,00	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya jumlah pelayanan antar kerja di daerah/kab/kota	230 orang	40.000.000,00		tersedianya jumlah pelayanan antar kerja di daerah/kab/kota		184.000.000,00	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja									
	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		0,00	
Pelayanan antar Kerja									
	Kab. Flores Timur, Lantuka	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	7.000.000,00	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									
	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Ite Boleng, Solor Barat	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ite Mandiri, Ite Boleng, Solor Barat	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	7.000.000,00	
Perluasan Kesempatan Kerja									
	Kab. Flores Timur, Lantuka-Lokea	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka-Lokea	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	170.000.000,00	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang Dibina (lembaga)	2 lembaga	6.000.000,00		Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang Dibina (lembaga)	2 lembaga	10.000.000,00	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS									
	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka-Puken Tobl Wangl Bao, Kecamatan Titehena-Konga	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2 Lembaga	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka-Puken Tobl Wangl Bao, Kecamatan Titehena-Konga	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2 Lembaga	10.000.000,00	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah dan Informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online (dok)	1 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah dan Informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online (dok)		1.000.000,00	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online									
	Kab. Flores Timur, Lantuka	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1.000.000,00	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) daerah kab/kota	745 orang	34.500.000,00		tersedianya perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) daerah kab/kota		55.000.000,00	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
	Kab. Flores Timur, Lantuka	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	20.000.000,00	
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran									
	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	525 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	525 Orang	20.000.000,00	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan									
	Kab. Flores Timur, Lantuka	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	15.000.000,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		persentase perkara perselisihan yang ditangani (%)	80%	123.850.000,00		persentase perkara perselisihan yang ditangani (%)		148.000.000,00	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikator (Rp)	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2		3	4	5	6	7	8	9	10
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota	20 perusahaan	30.000.000,00		tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota		40.000.000,00	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									
	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ie Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ie Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	15.000.000,00	
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan									
	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ie Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ie Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ie Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ie Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	15.000.000,00	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		tercegahnya dan terselesainya penyelesaian hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota		93.850.000,00		tercegahnya dan terselesainya penyelesaian hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota		108.000.000,00	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	38.850.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	23.000.000,00	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara	25.000.000,00	
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi									
	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Solor Timur, Ie Boleng	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Solor Timur, Ie Boleng	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.000.000,00	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Lantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga, Solor Timur, Solor Barat, Ile Boleng	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Lantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga, Solor Timur, Solor Barat, Ile Boleng	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200	45.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				261.700.000,00				715.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				261.700.000,00				715.000.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (dok)	2 Dokumen	41.700.000,00		Jumlah dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (dok)		-	
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (kawasan)	4 Kawasan	41.700.000,00		Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (kawasan)		-	
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi									
	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Waibao Kab. Flores Timur, Demong Pagong, Lewokluok	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Waibao Kab. Flores Timur, Demong Pagong, Lewokluok	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	-	
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan									
	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Belota Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Tuawolo Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	4 Kawasan Transmigrasi	26.700.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Belota Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Tuawolo Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	4 Kawasan Transmigrasi	-	
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi									
	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0 Hektar	0,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		0,00	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah UPT yang dibangun (%)		90.000.000,00		Jumlah UPT yang dibangun (%)		565.000.000,00	
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk		90.000.000,00		tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk		565.000.000,00	
Penyuluhan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran									
	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Waibao Kab. Flores Timur, Demong Pagong, Lewokluok	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Waibao Kab. Flores Timur, Demong Pagong, Lewokluok	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	2 Dokumen	550.000.000,00	
Penyuluhan Transmigrasi									
	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	500 Kepala Keluarga	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		15.000.000,00	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2		3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		persentase unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang dikembangkan	100%	130.000.000,00		persentase unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang dikembangkan		150.000.000,00	
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	2 Satuan Permukiman	130.000.000,00		tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian		150.000.000,00	
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman									
	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga	50.000.000,00	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman									
	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	100.000.000,00	
				3.162.496.050,00					4.320.700.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan pemangku kepentingan disajikan dalam bentuk usulan musrembang kecamatan tiap tahunnya yang direkap oleh OPD dan juga melalui aspirasi masyarakat atau pokir. Usulan masyarakat yang dipilah juga disesuaikan dengan kelogisan usulan dan kesesuaian dengan program kegiatan. Uraian dapat dilihat pada **table lampiran 2.4**. Usulan Yang diusulkan oleh masyarakat tidak sepenuhnya dapat diterima ada banyak aspek kesesuaian yang perlu mendapat perhatian dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, besaran anggaran yang akan direalisasikan serta kesesuaian dengan usulan yang ada dilapangan. Usulan pada Tahun 2025 terlihat pada program pelatihan kerja dn produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.

TABEL 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	BESARAN/VOLUME	LOKASI	CATATAN
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Orang	Usulan Kecamatan/Desa/Kelurahan: Desa Dawataa, Desa Terong Kec. Adonara Timur, Kel. Larantuka, Sarotari Tengah, Amagarapati, Sarotari, Waihalu, Pantai Besar Kec. Larantuka, Desa Riangkemie Kec. Ile Mandiri, Desa Bantala Kec. Lewolema, Desa Lewokluok Kec. Demon Pagong, Desa Lamaleka Kec. Witihamu, Narasaosina Kec. Adonara Timur, Desa Nurri, Birawan, Riangrita, Kec. Ile Bura, Desa Ritaebang Kec. Solor Barat, Desa Tenawahang Kec. Titehena, Desa Pandai Kec. Wotan Ulumado,	disesuaikan dengan usulan pada saat Musrembang Kecamatan, Musrembang Kabupaten Tahun 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan ekonomi nasional diarahkan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui tema :*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. sasaran pembangunan Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi, Indeks Modal manusia, nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan dan menurunkan *tingkat Pengangguran Terbuka*, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan serta intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Sejalan dengan kebijakan nasional yakni percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, ekonomi Flores Timur di Tahun 2024 diperkirakan tumbuh menjadi 3,43 persen. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 tersebut, maka pembangunan nasional diarahkan pada 8 prioritas Nasional yang dijabarkan . Penjabaran 8 prioritas ini salah satunya memuat tentang prioritas dalam OPD Tenaga Kerja yaitu pada point keempat(Sumber : RKPD Kab. Flores Timur Tahun 2025)yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia,sains dan teknologi, pendidikan ,kesehatan,prestasi olahraga,kesetaraan gender,serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, yang ditandai dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka sekitar :4,50-5,00. dan juga point keenam yaitu arah kebijakan membangun dari desa dan dari bawah

Untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang ditandai dengan terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk : 15% Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan :43,19%.

Berdasarkan dokumen RKPD Tahun 2025 Kabupaten Flores Timur menjelaskan tentang gambaran hubungan antara arah kebijakan RPD, permasalahan pembangunan (hasil evaluasi tahunan), arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional, pokok pikiran DPRD dan Arahkan kepala Daerah dengan isu strategis, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2025 tersebut tertuang dalam point ketiga yaitu Terwujudnya mausia dan masyarakat yang berkualitas , dimana salah satu point permasalahan pembangunan (hasil evaluasi) bahwa **Kurangnya Kesempatan Kerja dan Rendahnya Produktivitas Angkatan Kerja**. Sehingga prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur

Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja masuk dalam point kedua yaitu Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, sasarannya Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Angkatan Kerja dan Indikator sasarannya(satuan) Yaitu 1) Angka Pengangguran Terbuka (%), 2) Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2023-2026 sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut:

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya daya saing	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,81	3,56	3,31	3,00	2,85	

Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Proyeksi Biaya Rencana Tahun 2025			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Detail Penting	Target	Kebutuhan Dana
2	3		4	5	6	7	8	9
DINAS TENAGA KERJA				1.011.050.000,00				1.011.050.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				749.350.000,00				1.011.050.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				749.350.000,00				1.011.050.000,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)		2,91%	542.000.000,00		persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)		542.000.000,00
	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standar (unit)		50 unit			Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standar (unit)		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		20 orang	532.000.000,00		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	20	532.000.000,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penerima Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi								
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ie Mandiri, Lewo Lema, Demong Pagong, Wihama, Adonara Timur, Ie Bura, Solor Barat, Titehena, Wotan Ulumado	40 orang	420.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ie Mandiri, Lewo Lema, Demong Pagong, Wihama, Adonara Timur, Ie Bura, Solor Barat, Titehena, Wotan Ulumado	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20	420.000.000,00
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja								
	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kab. Flores Timur, Larantuka, Adonara Barat, Wulanggitang, Ie Mandiri	5 Lembaga	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Adonara Barat, Wulanggitang, Ie Mandiri	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	12.000.000,00
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								

Urutan / Bidang Urutan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pada Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET	Kebutuhan Dana
2	3		4	5	6	7	8	9
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Flores Timur, Larantuka	50 Unit	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	70	150.000.000,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		5 lembaga	10.000.000,00		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5	10.000.000,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka-Lokea, Waihalil, Waibalun, Kecamatan Wulangitang-Hokeng Jaya, Kecamatan Adonara Barat-Waiwadan	5 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka-Lokea, Waihalil, Waibalun, Kecamatan Wulangitang-Hokeng Jaya, Kecamatan Adonara Barat-Waiwadan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	10.000.000,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase penyerapan tenaga kerja (%)		48,2%	83.500.000,00		persentase penyerapan tenaga kerja (%)		250.000.000,00
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya jumlah pelayanan antar kerja di daerah/kab/kota		230 orang	40.000.000,00		tersedianya jumlah pelayanan antar kerja di daerah/kab/kota		184.000.000,00
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja								
	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		0,00
Pelayanan antar Kerja								
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Flores Timur, Larantuka	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	7.000.000,00
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja								
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Ile Boleng, Solor Barat	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Ile Boleng, Solor Barat	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	7.000.000,00
Perluasan Kesempatan Kerja								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Ketukutan Dana
2	3		4	5	6	7	8	9
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Flores Timur, Larantuka-Lokea	30 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka-Lokea	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	170.000.000,00
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang Dibina (lembaga)		2 lembaga	6.000.000,00		Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang Dibina (lembaga)	2 lembaga	10.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS								
	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka-Puken Tobl Wangi Bao,	2 Lembaga	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka-Puken Tobl Wangi Bao,	Jumlah LPTKS yang Dilakukan	2 Lembaga	10.000.000,00
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah dan Informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online (dok)		1 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah dan Informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online (dok)		1.000.000,00
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online								
	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Flores Timur, Larantuka	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1.000.000,00
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	tersedianya perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) daerah		745 orang	34.500.000,00		tersedianya perlindungan PMI		55.000.000,00
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)								
	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kab. Flores Timur, Larantuka	200 Orang	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	20.000.000,00
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran								
	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	525 Orang	20.000.000,00
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan								
	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kab. Flores Timur, Larantuka	20 Orang	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	15.000.000,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase perkara perselisihan yang ditangani (%)		80%	123.850.000,00		persentase perkara perselisihan yang ditangani (%)		148.000.000,00

1 Urutan / Bidang Urutan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2 Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	3 Lokasi	4 Target Capaian Kinerja	5 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	6 Sumber Dana	7 Catatan Penting	8 Target	9 Kebutuhan Dana
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota		20 perusahaan	30.000.000,00		tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota	10	40.000.000,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan								
	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	10 Perusahaan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	15.000.000,00
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan								
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	10 Perusahaan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	10.000.000,00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan								
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	15.000.000,00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	tercegahnya dan terselesainya penyelesaian hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota			93.850.000,00		tercegahnya dan terselesainya penyelesaian hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota		108.000.000,00
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Perkara	38.850.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	23.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana
2	3		4	5	6	7	8	9
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Bersiklat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Perkara	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	25.000.000,00
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi								
	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Solor Timur, Ile Boleng	6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Solor Timur, Ile Boleng	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.000.000,00
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja								
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga, Solor Timur, Solor Barat, Ile Boleng	100 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Titehena, Wotan Ulumado, Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Demong Pagong, Tanjung Bunga, Solor Timur, Solor Barat, Ile Boleng	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	45.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				261.700.000,00				715.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				261.700.000,00				715.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (dok)		2 Dokumen	41.700.000,00		Jumlah dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (dok)	2 Dokumen	-
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (kawasan)		4 Kawasan	41.700.000,00		Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (kawasan)	2	-
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi								
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Waibao Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Waibao Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	-
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana
2	3		4	5	6	7	8	9
	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Belota Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Tuawolo Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	4 Kawasan Transmigrasi	26.700.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Belota Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Tuawolo Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	4 Kawasan Transmigrasi	
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi								
	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Hektar	0,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2 hektar	0,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah UPT yang dibangun (%)			90.000.000,00		Jumlah UPT yang dibangun (%)		565.000.000,00
<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk</i>			90.000.000,00		<i>tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk</i>		565.000.000,00
Penyediaan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran								
	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Waibao Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Waibao Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)		550.000.000,00
Penyuluhan Transmigrasi								
	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Kepala Keluarga	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		15.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	persentasi unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang dikembangkan		100%	130.000.000,00		persentasi unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang dikembangkan	50	130.000.000,00
<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>	<i>tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian</i>		2 Satuan Permukiman	130.000.000,00		<i>tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian</i>	2	130.000.000,00
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman								

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana
2	3		4	5	6	7	8	9
	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	50 Kepala Keluarga	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga	30.000.000,00
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman								
	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	2 Satuan Permukiman	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Adabang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	100.000.000,00
				1.011.050.000,00				1.735.000.000,00

3. Program dan Kegiatan Tahun 2023-2026

RKPD Kabupaten Flores Timur RKPD Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam RPD yaitu : 1) terwujudnya daya saing daerah, 2) Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, 3) Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas dan 4) Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Dinas Tenaga Kerja melalui tujuan dan sasaran pembangunan yang ada termasuk dalam point pertama terwujudnya daya saing manusia pada indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dari masing-masing sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pada ulasan ini dapat dilihat pada tabel 3.3.

Jumlah Program Pada Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja

a. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja membiayai

- ✓ 2 Urusan
- ✓ 7 Program
- ✓ 19 Kegiatan
- ✓ 63 Sub Kegiatan

b. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Meembiayai:

- ✓ 2 Urusan
- ✓ 6 Program
- ✓ 18 Kegiatan
- ✓ 54 Sub Kegiatan

Pada Program kegiatan ada beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya penurunan angka pengangguran di Kabupaten Flores Timur yaitu Program Pelatihan Tenaga Kerja

dan Produktivitas Tenaga Kerja ,Program Penempatan Tenaga Kerja dan program Hubungan Industrial.

Lokasi berdasarkan urusan ketenagakerjaan pada Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja disesuaikan dengan usulan pada saat Musrembang Kabupaten sehingga usulan ini didasarkan pada aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan program kegiatan dalam Dinas Tenaga Kerja, begitu pula terkait program Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dimana seluruh CPMI/PMI di Kabupaten Flores Timur diberikan pelayanan,perlindungan baik sebelum ditempatkan, setelah ditempatkan dan dipulangkan dari penempatannya bahkan ketika berselisih dengan pemberi kerja akan diberikan perlindungan dan mediaasi sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Dibawah ini terlihat pada Tabel 3.1 menjelaskan tentang rumusan rencana program dan kegiatan dan prakiraan maju Tahun 2026. Dinas Tenaga Kerja juga mempunyai sumber dana dari Termasuk Dau yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan yaitu pada proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasar kan klaser kompetensi serta sub kegiatan penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan per program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan perangkat daerah Tahun 2025. Pada Rancangan Akhir Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 terdapat :

- a) 2 Urusan yaitu Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- b) 6 Program yaitu Program penunjang urusan pemerintahan ; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja ; Program Hubungan Industrial, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi ; Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- c) 18 Kegiatan
- d) 54 Sub Kegiatan
- e) Pagu akhir Tahun 2025 Rp. 3.546.350.000,- dan pagu Perkiraan maju Tahun 2026 Rp. 3.333.827.594,-

sebagai berikut : Uraian ini dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA KAB. FLORES TIMUR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAKU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA						3.546.350.000,00							3.123.827.594,39	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.291.350.000,00							3.123.827.594,39	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3.291.350.000,00							3.123.827.594,39	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.372.500.000,00						-	2.485.347.594,39	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	53.000.000,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya sang a) Penunjang Prioritas	-	-	115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya sang a) Penunjang Prioritas	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya sang a) Penunjang Prioritas	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	GAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pambangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pambangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.873.000.000,00			-	2. Pambangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-	-	1.936.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.805.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Pambangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		1.861.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	57.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pambangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		59.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBERHASILAN PENJAJARAN					KELUARAN SASARAN	KINERJA KINERJA TAKSIRAN 2024		KINERJA KINERJA TAKSIRAN 2024	
							TARGET 2025	PAJU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAJU INDIKATOR (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.07.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantulu, Pukutubi, Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pembelian SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa, Kab. Flores Timur, Lantulu, Pukutubi, Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pembelian SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	9.000.000,00			-	2. Pembelian SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantulu, Pukutubi, Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pembelian SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.03.0006 Rakornisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Rakornisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantulu, Pukutubi, Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pembelian SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL. DESKOR SABARAN	PRAKIRAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		REKAPITULASI PENGANGGARAN JABAT
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan bertaya saling si Penunjang Prioritas	-	-	12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timor, Larantuka, Pukentobi Wiangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan bertaya saling si Penunjang Prioritas	-		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timor, Larantuka, Pukentobi Wiangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan bertaya saling si Penunjang Prioritas	-		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	124.300.000,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan bertaya saling si Penunjang Prioritas	-	-	165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timor, Larantuka, Pukentobi Wiangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan bertaya saling si Penunjang Prioritas	-		3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling x) Penunjang Prioritas	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling x) Penunjang Prioritas	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling x) Penunjang Prioritas	-		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling x) Penunjang Prioritas	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling x) Penunjang Prioritas	-		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRATRA OPD TAHUN 2023	PELAKSANAAN CAPAIAN RESTRATRA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KEMERIA DAS KEMERINDA PENGUSAHA						KELOMPOK SASARAN	PELAKSANAAN KEMERINDA PENGUSAHA TAHUN 2023		PELAKSANAAN KEMERINDA PENGUSAHA TAHUN 2024
							TARGET 2023	PAJU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAJU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas/ Kunjungan Tamu				12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timor, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x1 Penunjang Prioritas	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	58.000.000,00	Kab. Flores Timor, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x1 Penunjang Prioritas	-		87.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	138.000.000,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x1 Penunjang Prioritas	-	-	44.847.504,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18.000.000,00	Kab. Flores Timor, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x1 Penunjang Prioritas	-		18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	65.000.000,00	Kab. Flores Timor, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x1 Penunjang Prioritas	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJHET ANAK PERIODE RENETRA CPO	REALISASI CAPAIAN RENETRA CPO TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARJHET RENETRA CPO TAHUN 2024	CAPAIAN KEBERUSAHAAN DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS						WILAYAH SABAH	PENCAPAIAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS TAHUN 2023		PENCAPAIAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS TAHUN 2024	
							TARJHET 2023	PAGU BOKATIF (RM)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARJHET	PAGU BOKATIF (RM)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45.000.000.00	Kab. Poreh Timur, Lumbura, Puanmudi, Wangah, Saco	PAJAK KENDARAAN BERSEKTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDH yang bermutu dan berkesan yang ii. Pamban gunan Prioritas	-		24.847.334.23	DIKAS TENGGA KETUA	
2.07.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000.00	Kab. Poreh Timur, Lumbura, Puanmudi, Wangah, Saco	PAJAK KENDARAAN BERSEKTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDH yang bermutu dan berkesan yang ii. Pamban gunan Prioritas	-		5.000.000.00	DIKAS TENGGA KETUA	
2.07.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
							-	80.000.000.00			-	2. Pamban gunan SDH yang bermutu dan berkesan yang ii. Pamban gunan Prioritas	-		10.000.000.00	DIKAS TENGGA KETUA	
2.07.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000.00	Kab. Poreh Timur, Lumbura, Puanmudi, Wangah, Saco	PAJAK KENDARAAN BERSEKTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDH yang bermutu dan berkesan yang ii. Pamban gunan Prioritas	-		1.000.000.00	DIKAS TENGGA KETUA	
2.07.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20.000.000.00	Kab. Poreh Timur, Lumbura, Puanmudi, Wangah, Saco	PAJAK KENDARAAN BERSEKTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDH yang bermutu dan berkesan yang ii. Pamban gunan Prioritas	-		15.000.000.00	DIKAS TENGGA KETUA	
2.07.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Perawatan dan Penguasaan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling x) Penunjang Prioritas	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	55.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling x) Penunjang Prioritas	-		63.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.000.000,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling x) Penunjang Prioritas	-	-	65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertninan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertnannya				3 Unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling x) Penunjang Prioritas	-		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saling x) Penunjang Prioritas	-		9.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		8.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukantobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	542.000.000,00						-	312.330.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	532.000.000,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	307.330.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				40 Orang	410.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tiahena, Tenaweshang Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantar Besar Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohiyong Kab. Flores Timur, Larantuka, Amgarasped Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Kab. Flores Timur, Larantuka, Wihali Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengan Kab. Flores Timur, Ite Mandri, Riangumia Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritasabang Kab. Flores Timur, Wotan Usumendo, Pandai Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Dawetas Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Taromh Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Narasasina Kab. Flores Timur, Wihama, Lemaliia Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lawokluok Kab. Flores Timur, Lawedema, Bartala Kab. Flores Timur, Ite Bura,	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		134.330.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Birewan Kab. Flores Timur, Ile Bura, Riang Rila Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nuri							
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				5 Lembaga	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semus Kecamatan, Semus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saling 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				50 Unit	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semus Kecamatan, Semus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saling 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	10.000.000,00			-	2. Peman- gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saling 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-	-	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				5 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Flores Tmur, Semus Kecamatan, Semus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saling 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	238.000.000,00						-	183.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU MENJARA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kera di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	160.000.000,00			-	2. Pemba- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x1) Penunjang Prioritas	-	-	158.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kera														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Dilampirkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				100 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemba- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x1) Penunjang Prioritas	-		8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemba- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x1) Penunjang Prioritas	-		8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Dibarengkan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				30 Orang	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemba- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x1) Penunjang Prioritas	-		138.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.000.000,00			-	2. Pemba- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x1) Penunjang Prioritas	-	-	2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				2 Lembaga	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing s) Penunjang Prioritas	-		2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	10.000.000,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing s) Penunjang Prioritas	-	-	1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi/ Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing s) Penunjang Prioritas	-		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	62.000.000,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing s) Penunjang Prioritas	-	-	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				200 Orang	27.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing s) Penunjang Prioritas	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PMI Puma yang Diberdayakan				20 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	138.850.000,00						-	143.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-	-	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				20 Perusahaan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	108.850.000,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-	-	118.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakut/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KNERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				20 Perkara	38.850.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		43.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				20 Perkara	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Tertaksennanya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				200 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Prioritas	-		33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						255.000.000,00							219.603.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						255.000.000,00							219.603.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	76.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKORAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKORAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Bersasil dan 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75.000.000,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Pnortas	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran														
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Walbae Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewoklucuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Pnortas	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	180.000.000,00						-	210.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	-	-			-	180.000.000,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Pnortas	-	-	210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				50 Kepala Keluarga	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tzehana, Adebang Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Naresaosina	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing x) Penunjang Pnortas	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2023	PRAKARSA CAPAIAN TANGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBERANGKIPAN PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKARSA MAJU BERKUALITAS TAHUN 2023		PENGANGKUT GABUNG PENGANGKUT GABUNG
							TAHAP 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Keberagasan				1 Satuan Pemukiman	100.000.000,00	Kab. Ponorogo Taman Tsihena Adipati Kab. Ponorogo Taman Adipati Taman Nandawati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemberian gumam SDM yang berkualitas dan berdaya seng K Pemerintah Praktis	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
J U M L A H								3.540.393.594,00							3.532.827.594,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun Rencana 2025 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN, RPJP Provinsi, RKPD Provinsi, RPJMPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 memperhatikan Kaidah-Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 memuat arah kebijakan Pembangunan dan berisikan Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Dokumen RKPD yang disusun memperhatikan kaidah kaidah perencanaan, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah , masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Untuk itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan Kesehatan yang tertuang dalam Renja Tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas.

Rencana kerja Tahun 2025 ini dijadikan sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2025 menuju ke APBD untuk pelaksanaan Renja. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 ini disusun sesuai ketentuan berdasarkan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025.

Larantuka, Agustus 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Ramon Mandiri Piran
Pembina Utama Muda
Nip. 196705011993031014